ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

DELLA SEPTI
NIM. B1011221232

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Della Septi
NIM	:	B1011221232
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 27 Juli 2026



Della Septi
NIM. B1011221232

PERNTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Della Septi
NIM	:	B1011221232
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 19 Mei 2026



Della Septi
NIM. B1011221232

LEMBAR YURIDIS

Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Penanggung Jawab Yuridis

Della Septi
B1011221232

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 25 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Metasari Kartika, S.E., M.E. NIP 198409152014042001	08 Juli 2026	
2.	Ketua Penguji	Dr. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP 196312091989031004	08 Juli 2026	
3.	Anggota Penguji	Romi Suradi, S.E.I., M.E. NIP 198610022019031004	07 Juli 2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak, 27 JUL 2026
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

PERNTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Della Septi
NIM	:	B1011221232
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal / TA	:	Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir adalah hasil karya penulis sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 19 Mei 2026



Della Septi
NIM. B1011221232

UCAPAN TERIMA KASIH

"Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku."

(Filipi 4:13)

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu menjadi penguat dalam setiap langkah, karena atas kasih karunia dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini merupakan syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura. Adapun judulnya yaitu "**ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA".** Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu, mendukung, membimbing dan memberikan saran, dukungan serta doa. Sehingga dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CMA., CfrA., CAPM., CAPF. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Barkah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah menjabat selama periode 2022 hingga pertengahan 2026.
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Metasari Kartika, S.E., M.E. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keahlian telah membimbing serta mengarahkan penulis hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta.
6. Bapak Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. selaku Ketua Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak masukan, kritik dan saran yang sangat membangun demi kesempurnaan penulisan ini.
7. Bapak Romi Suradi, S.E.I., M.E. selaku Dosen Penguji Kedua, yang telah memberikan ilmu, koreksi dan wawasan berharga untuk menyempurnakan penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Ibu Helly Suharlina, S.E., M.M. (Almh.) selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus Ibu Kost yang telah banyak memberikan bantuan, kebaikan, serta keteladanan yang sangat berkesan bagi penulis. Semoga amal kebaikan beliau mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, wawasan, serta dedikasi luar biasa selama masa perkuliahan.

10. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, Tata Usaha serta Karyawan, atas bantuan dan kelancaran proses administrasi yang diberikan sepanjang penyusunan Tugas Akhir ini.
11. Kedua Orang Tua Terkasih, Papa dan Mama, sosok paling berharga dalam hidup penulis. Terima kasih tak terhingga atas doa yang tak pernah putus di setiap langkah, setiap tetes keringat dan kasih sayang tanpa syarat yang menyertai penulis hingga titik ini. Walaupun Papa dan Mama tidak menempuh pendidikan tinggi, keterbatasan itu tidak pernah menyurutkan tekad dan ketulusan kalian untuk memperjuangkan pendidikan penulis. Terima kasih telah berhasil membuktikan bahwa harapan dan kerja keras kalian mampu melahirkan sarjana pertama di keluarga kita. Gelar ini sepenuhnya penulis persembahkan untuk Papa dan Mama. Penulis sadar mungkin belum bisa menjadi anak yang sempurna seperti yang dibayangkan, tetapi penulis akan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk membuat kalian bangga. Semoga Papa dan Mama selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, ketenangan hati, serta kebahagiaan yang melimpah dari Tuhan.
12. Adik tersayang penulis, Evan Ariko (Oko), sosok adik sekaligus sahabat terbaik penulis saat di rumah. Terima kasih ya sudah selalu ada, dan menjadi tempat berbagi cerita, serta memberikan hiburan tersendiri di tengah kepenatan penulis selama menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis sangat bersyukur dan senang punya adik seperti Oko, meskipun kadang penulis suka marah ataupun selisih paham. Semoga Oko tumbuh menjadi anak yang selalu baik, bertanggung jawab dan rendah hati serta selalu dilancarkan dalam meraih setiap cita-citamu ke depannya.
13. Adik-adik sepupu dan keponakan penulis yang manis, khususnya Andra dan Charles, terima kasih banyak sudah menjadi hiburan walaupun jauh. Tingkah lucu dan kepolosan kalian selalu berhasil mengembalikan senyum serta meringankan beban pikiran penulis di tengah lelahnya menyusun tugas akhir ini. Sehat-sehat selalu untuk adik-adik yang manis, tumbuh menjadi anak yang pintar dan membanggakan.
14. Untuk Kakek dan Nenek penulis, Kakek Isa, Nenek Punak dan Nenek Selimah (Mendiang) serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ketulusan doa, perhatian dan kasih sayang yang selalu mengalir. Setiap dorongan semangat dari kalian adalah penguat langkah bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga Kakek, Nenek dan seluruh keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta umur panjang dan penuh berkah.
15. Untuk sahabat baik penulis selama masa perkuliahan, Nurfitri dan Endah, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa dan keluh kesah sejak awal perkuliahan hingga akhir perjalanan ini. Terima kasih sudah saling mendukung dan menguatkan di saat-saat sulit. Semoga langkah kalian ke depan selalu diberkati dan dilancarkan dalam setiap proses dan impian di manapun kalian berada.
16. Teman-teman baik penulis di Kost K9, Nesa, Nur, Abel, Shiva, Veron, Elsa dan sahabat masa kecil penulis, Nana, terima kasih banyak atas kehangatan dan kebersamaan yang tak ternilai harganya. Dari setiap obrolan hangat dan

17. sederhana di kost, kalian telah menciptakan suasana hangat bagaikan rumah dan keluarga bagi penulis selama jauh dari rumah. Sukses dan sehat selalu untuk kalian semua dalam menggapai masa depan masing-masing.
18. Kak Harma, walaupun bukan keluarga kandung, beliau adalah kakak kost penulis ketika SMP yang sudah dianggap seperti kakak kandung sendiri. Terima kasih banyak atas segala kebaikan, perhatian dan ketulusan yang tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini. Terima kasih telah menjadi sosok kakak yang selalu peduli. Semoga Kak Harma selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta kelancaran rezeki dan kebaikan di mana pun beliau berada.
19. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022, khususnya Kelas E yang penulis banggakan. Terima kasih untuk empat tahun yang luar biasa. Terima kasih sudah sama-sama berjuang dari awal perkuliahan, melewati lika-liku tugas dan ujian, hingga akhirnya bisa sampai di titik ini. Setiap tawa, kebersamaan dan solidaritas kalian akan selalu menjadi kenangan paling berharga bagi penulis. Sukses selalu untuk kita semua di mana pun berada.
20. Kemudian kepada keluarga jauh yang telah turut membantu selama awal-awal perkuliahan, Om Udin (Alm.), Paman Masius, Paman Nanus, Om Djanoer, dan semua pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu-satu, terima kasih yang mendalam atas segala bantuan tulus yang telah diberikan kepada penulis sejak awal perkuliahan, seluruh kebaikan dan jasa kalian akan selalu tersimpan rapi dan diabadikan dalam ingatan penulis.
21. Terakhir, terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk diri saya sendiri. Sebagai anak perempuan pertama yang tumbuh dengan memikul begitu banyak harapan orang-orang tersayang, terima kasih karena sudah mau bertahan, tidak pernah menyerah di masa-masa tersulit, dan terus berjuang melangkah sejauh ini. Terima kasih telah bersabar dengan segala proses, lelah dan ragu, hingga akhirnya bisa membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan tanggung jawab ini dengan baik. Harapannya semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan yang cukup juga keberanian untuk terus tumbuh menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Jika masalah dan proses panjang di masa lalu bisa dilewati dengan baik, percayalah bahwa tantangan apapun di depan nanti juga pasti bisa dilalui. Penyertaan Tuhan Yesus selalu ada di setiap langkah, jadi jangan pernah takut untuk terus maju dan menyambut masa depan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, 19 Mei 2026



Penulis,
Della Septi
NIM. B1011221232

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Della Septi[1]

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan di Indonesia yang masih persisten dan fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis determinan ketimpangan pembangunan di Indonesia melalui variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Transfer ke Daerah (TKD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2017 hingga 2024. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia sebagai unit analisis. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Indonesia, serta hasil olahan data mandiri. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang diolah menggunakan Eviews 12 serta didukung juga dengan analisis Tipologi Klassen untuk pemetaan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan PDRB, TKD dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia pada periode penelitian. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi kebijakan melalui perluasan alokasi transfer fiskal yang asimetris dan penguatan standar pelayanan modal manusia secara merata guna mendorong konvergensi pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan; Produk Domestik Regional Bruto; Transfer ke Daerah; Indeks Pembangunan Manusia; Regresi Data Panel.

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Oleh: DELLA SEPTI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

RINGKASAN

1. Latar Belakang

Penelitian ini membahas ketimpangan pembangunan antarprovinsi di Indonesia yang masih tinggi dan cenderung berfluktuasi selama periode 2017–2024. Berdasarkan data Indeks Williamson, ketimpangan di sejumlah provinsi seperti Papua Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan beberapa provinsi lain berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa pembangunan belum merata antardaerah. Kondisi ini menjadi persoalan penting karena pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat belum tentu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah. Ketimpangan pembangunan ini masih menjadi masalah utama di Indonesia karena hasil pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh provinsi. Ada daerah yang maju pesat dengan pertumbuhan ekonomi dan fasilitas yang lengkap, tetapi ada juga daerah yang masih tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur, investasi, dan kualitas sumber daya manusia. Dalam penelitian ini, ketimpangan pembangunan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, transfer ke daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia. PDRB yang tinggi tidak selalu menurunkan ketimpangan, karena sering kali hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu. Sementara itu, transfer ke daerah seharusnya membantu daerah yang lemah secara fiskal agar dapat mempercepat pembangunan. Di sisi lain, IPM menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti tiga faktor utama tersebut untuk melihat sejauh mana pengaruhnya terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan merata.

2. Rumusan Masalah

2.1 Bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia?

2.2 Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia?

2.3 Apakah Transfer Ke Daerah (TKD) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia?

2.4 Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

3.1 Untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan di Indonesia.

3.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

3.3 Untuk menguji dan menganalisis TKD terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

3.4 Untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia.

4. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang mencakup 34 provinsi di Indonesia selama tahun 2017–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari BPS dan DJPK Kementerian Keuangan, sedangkan ketimpangan pembangunan diukur menggunakan Indeks Williamson yang diolah secara mandiri. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel dan dipilih model *Fixed Effect Model* sebagai model terbaik berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Selain itu, penelitian ini juga memakai analisis Tipologi Klassen untuk memetakan kondisi wilayah berdasarkan karakteristik PDRB, TKD dan IPM.

5. Hasil dan pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan dan memiliki daya jelaskan yang sangat kuat, terlihat dari nilai R^2 yang tinggi yakni 93,34%. Secara parsial, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan, yang berarti peningkatan PDRB justru cenderung memperlebar disparitas antarwilayah. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bersifat terkonsentrasi di wilayah tertentu dan belum sepenuhnya menyebar ke daerah lain. Dengan kata lain, mekanisme pemerataan seperti *trickle-down effect* belum berjalan optimal. Sebaliknya, TKD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan. Artinya, kenaikan alokasi transfer fiskal dari pemerintah pusat dapat membantu menurunkan kesenjangan antarprovinsi karena memperkuat kapasitas belanja publik dan pembangunan daerah. IPM juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dapat menjadi instrumen penting untuk mempersempit jurang pembangunan antarwilayah. Hasil Tipologi Klassen juga menunjukkan adanya sejumlah provinsi yang masuk kategori wilayah tidak merata dan membutuhkan percepatan pembangunan struktural.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia masih tinggi dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu. PDRB justru terbukti meningkatkan ketimpangan, sedangkan transfer ke daerah dan IPM berperan dalam menurunkannya. Ini menunjukkan bahwa PDRB saja tidak cukup untuk menciptakan pemerataan, sehingga perlu didukung oleh kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran serta peningkatan kualitas manusia yang merata. Rekomendasi yang diberikan adalah agar pemerintah tidak hanya mengejar PDRB, tetapi juga memperkuat pembangunan inklusif melalui pemerataan infrastruktur, pelayanan dasar, dan kualitas SDM. Alokasi transfer ke daerah perlu diarahkan lebih asimetris dan produktif agar mampu mendorong daerah tertinggal mengejar ketertinggalannya. Selain itu, peningkatan standar pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara merata, terutama di wilayah yang masih tertinggal, supaya proses konvergensi pembangunan antarprovinsi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ..... **ii**
PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR ..... **xv**
LEMBAR
YURIDIS ..... **xvi**
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR ..... **iv**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**
ABSTRAK ..... **viiii**
RINGKASAN ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xxv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xxvi**
ABSTRACT **1**
1. PENDAHULUAN **2**
2. KAJIAN LITERATUR **11**
2.1 Tinjauan Teori 11
2.1.1 *New Economic Geography Theory* (NEG) 11
2.1.2 Teori Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole Theory*) 12
2.1.3 Teori Transfer Menurut Rosen & Gayer 12
2.1.4 Teori *Human Capital* 13
2.2 Kajian Empiris 13
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 15
2.3.1 Kerangka Konseptual 15
2.3.2 Hipotesis Penelitian 15
3. METODE PENELITIAN **15**
3.1 Bentuk, Tempat dan Waktu Penelitian 15
3.2 Jenis dan Sumber Data 16
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 16
3.4 Metode dan Alat Analisis 17
3.4.1 Analisis Indeks Williamson 17
3.4.2 Model Analisis Regresi Data Panel 18
3.4.3 Analisis *Klassen Typology* 21
4. HASIL DAN PEMBAHASAN **22**
4.1 Hasil Penelitian 22
4.1.1 Pemilihan Model Regresi Data Panel 22
4.1.2 Uji Asumsi Klasik 23
4.1.3 Pengujian Hipotesis dengan Regresi Data Panel 24
4.1.4 Uji Hipotesis 25
4.2 Pembahasan 26
4.2.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Ketimpangan Pembangunan (IW) Antarprovinsi di Indonesia 26
4.2.2 Pengaruh Transfer Ke Daerah (TKD) Terhadap Ketimpangan Pembangunan (IW) Antarprovinsi di Indonesia 30

4.2.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Ketimpangan Pembangunan (IW) Antarprovinsi di Indonesia 34
5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 37
5.1 Kesimpulan..... 37
5.2 Rekomendasi..... 38
DAFTAR RUJUKAN 40
LAMPIRAN 44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indeks Williamson Antarprovinsi di Indonesia Tahun 2017-2024.....3
Tabel 1. 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2017-2024.....5
Tabel 1. 3 Total Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Indonesia Tahun 2017-2024 ...7
Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2024 9
Tabel 4. 1 Hasil Uji Pemilihan Model 22
Tabel 4. 2 Hasil Uji Skewness dan Kurtosis.....23
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas (Uji Glejser), dan Autokorelasi.....23
Tabel 4. 4 Regresi Data Panel *Fixed Effect Model* (FEM).....24
Tabel 4. 5 Hasil Uji t, F dan R^2.....25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 15
Gambar 3. 1 Analisis *Klassen Typology*.....22
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....23
Gambar 4. 2 Tipologi Klassen Produk Domestik Regional Bruto dan Ketimpangan Pembangunan.....27
Gambar 4. 3 Tipologi Klassen Transfer ke Daerah dan Ketimpangan Pembangunan.....31
Gambar 4. 4 Tipologi Klassen Indeks Pembangunan Manusia dan Ketimpangan Pembangunan.....35

ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

[1]DELLA SEPTI
Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research is motivated by the persistent and fluctuating regional development disparity in Indonesia. This study aims to examine and analyze the determinants of development inequality in Indonesia through the variables of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Regional Transfer (TKD), and Human Development Index (HDI) during the 2017–2024 period. This study covers 34 provinces in Indonesia as the unit of analysis. Secondary data were obtained from BPS Statistics Indonesia, the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) Indonesia, and self-processed data. The analytical method used is panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach, processed using Eviews 12, and supported by Klassen Typology analysis for spatial mapping. The results indicate that, both partially and simultaneously, GRDP, TKD, and HDI have a significant effect on development inequality in Indonesia during the research period. This study recommends the importance of policy reform through the expansion of asymmetric fiscal transfer allocations and the strengthening of human capital service standards evenly to encourage inclusive development convergence in Indonesia.

Keywords: *Development Inequality; Gross Regional Domestic Product; Regional Transfer; Human Development Index; Panel Data Regression.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan di Indonesia yang masih persisten dan fluktuatif. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis determinan ketimpangan pembangunan di Indonesia melalui variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Transfer ke Daerah (TKD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2017 hingga 2024. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia sebagai unit analisis. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Indonesia, serta hasil olahan data mandiri. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang diolah menggunakan Eviews 12 serta didukung juga dengan analisis Tipologi Klassen untuk pemetaan spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan PDRB, TKD dan IPM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pembangunan di Indonesia pada periode penelitian. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi kebijakan melalui perluasan alokasi transfer fiskal yang asimetris dan penguatan standar pelayanan modal manusia secara merata guna mendorong konvergensi pembangunan yang inklusif di Indonesia.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan; Produk Domestik Regional Bruto; Transfer ke Daerah; Indeks Pembangunan Manusia; Regresi Data Panel.

[1] *b1011221232@student.untan.ac.id*

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan pembangunan yang mencakup dimensi individu, rumah tangga, hingga antarwilayah masih menjadi isu krusial secara global dan lokal yang umum terjadi dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, yakni sebagai suatu negara yang hingga saat ini masih menghadapi tingkat ketimpangan pembangunan yang tinggi (Suparman & Muzakir, 2023). Di mana terdapat daerah maju yang meraih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) signifikan, sementara daerah lain yang terbelakang mengalami pertumbuhan lambat (Istrate & Horea-Serban, 2016). Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan peluang yang mengakibatkan adanya disparitas wilayah yang tajam. Disparitas fasilitas dan ketersediaan sumber daya ini dapat berujung pada perbedaan signifikan dalam kemampuan daerah untuk mendorong PDRB dalam melaksanakan proses pembangunan. Akibatnya, terbentuk pembagian wilayah yang jelas antara wilayah yang relatif maju (*developed region*) dan wilayah yang relatif terbelakang (*underdeveloped region*) (Sjafrizal, 2014:107).

Ketimpangan antarwilayah timbul akibat tidak meratanya pembangunan ekonomi antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut merupakan hasil alami dari awal pembangunan yang fokus pada pusat-pusat pertumbuhan, dan merupakan fase sementara yang harus dilalui sebelum tercapainya pemerataan (Ismail, 2020). Menurut Sjafrizal (2014:112), hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk perbedaan dalam kekayaan sumber daya alam, kondisi demografis, konsentrasi aktivitas ekonomi, hambatan dalam mobilitas, serta distribusi dana pembangunan antarwilayah. Todaro & Smith (2011) menyatakan bahwa pembangunan yang dilakukan secara parsial atau tidak merata berisiko memperbesar disparitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, disparitas fasilitas dan kapasitas pertumbuhan antarwilayah tersebut menuntut adanya keseimbangan pilar pembangunan yang tidak hanya mengejar profitabilitas sektoral, melainkan juga menyelaraskan kinerja aktivitas ekonomi guna mencapai target pembangunan berkelanjutan secara inklusif (Dosinta et al., 2024). Kegagalan dalam mewujudkan penyelarasan ini tidak hanya akan memperlebar kesenjangan antardaerah, melainkan juga menghambat tercapainya target pemerintah serta *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya poin ke-10 mengenai pengurangan ketimpangan. Mengingat SDGs secara tegas menekankan prinsip *no one left behind*, pembenahan disparitas ini menjadi prasyarat mutlak agar tidak terjadi penurunan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Menurut Todaro (2000) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan antarkelompok, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran publik. Alokasi ini dapat direalisasikan secara langsung melalui transfer pembayaran, dan secara tidak langsung melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi di bidang pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan redistribusi pendapatan yang lebih merata dan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar penting guna mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Sementara itu, pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan pokok bagi setiap negara, terutama negara berkembang, yang didefinisikan sebagai rangkaian upaya meningkatkan aktivitas perekonomian untuk menghasilkan infrastruktur yang lebih luas, pertumbuhan jumlah dan perkembangan perusahaan, peningkatan kualitas pendidikan,

serta kemajuan teknologi. (Alfurqani et al., 2021). Pembangunan ekonomi bersifat multidimensi yang mencakup transformasi sosial dan peningkatan kualitas hidup, tidak sekadar pertumbuhan ekonomi semata. (Arsyad, 2010: 31). Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dalam suatu negara, karena ini merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dengan adanya pemerataan suatu pembangunan baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, secara langsung maupun tidak langsung dapat meminimalisir ketimpangan pembangunan antarwilayah (Azim et al., 2022).

Tabel 1. 1 Indeks Williamson Antarprovinsi di Indonesia

Provinsi	Indeks Williamson Menurut Provinsi Di Indonesia (Skala Indeks)								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Aceh	0.33	0.33	0.34	0.34	0.39	0.42	0.43	0.44	0.38
Sumatera Utara	0.57	0.57	0.58	0.56	0.56	0.56	0.59	0.58	0.57
Sumatera Barat	0.26	0.26	0.27	0.30	0.28	0.30	0.30	0.32	0.29
Riau	0.37	0.35	0.33	0.30	0.28	0.26	0.25	0.27	0.30
Jambi	0.46	0.47	0.47	0.47	0.45	0.43	0.43	0.42	0.45
Sumatera Selatan	0.71	0.72	0.72	0.73	0.74	0.74	0.78	0.75	0.74
Bengkulu	0.41	0.40	0.40	0.40	0.42	0.45	0.45	0.45	0.42
Lampung	0.26	0.26	0.26	0.24	0.24	0.28	0.30	0.22	0.26
Kep. Bangka Belitung	0.20	0.20	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.19	0.19
Kep. Riau	0.49	0.46	0.45	0.41	0.40	0.39	0.37	0.30	0.41
DKI Jakarta	0.51	0.51	0.50	0.49	0.48	0.48	0.49	0.50	0.50
Jawa Barat	0.70	0.70	0.69	0.67	0.73	0.74	0.74	0.73	0.71
Jawa Tengah	0.64	0.64	0.63	0.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65
DI Yogyakarta	0.48	0.48	0.47	0.47	0.47	0.48	0.48	0.53	0.48
Jawa Timur	0.96	0.97	0.97	0.97	0.98	0.99	0.99	0.98	0.98
Banten	0.77	0.63	0.63	0.76	0.77	0.77	0.77	0.77	0.73
Bali	0.27	0.27	0.26	0.20	0.17	0.43	0.44	0.40	0.30
Nusa Tenggara Barat	0.78	0.60	0.57	0.72	0.71	0.78	0.73	0.74	0.70
Nusa Tenggara Timur	0.66	0.66	0.67	0.65	0.63	0.62	0.66	0.64	0.65
Kalimantan Barat	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28
Kalimantan Tengah	0.19	0.19	0.19	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21
Kalimantan Selatan	0.45	0.44	0.44	0.43	0.43	0.44	0.44	0.43	0.44
Kalimantan Timur	0.50	0.48	0.48	0.47	0.45	0.46	0.46	0.45	0.47
Kalimantan Utara	0.18	0.16	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.17
Sulawesi Utara	0.50	0.50	0.50	0.49	0.50	0.50	0.49	0.40	0.49
Sulawesi Tengah	0.54	0.80	1.00	1.11	1.24	1.36	1.47	1.53	1.13
Sulawesi Selatan	0.68	0.69	0.71	0.77	0.77	0.78	0.78	0.80	0.75
Sulawesi Tenggara	0.45	0.45	0.45	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47
Gorontalo	0.15	0.15	0.14	0.19	0.19	0.19	0.21	0.19	0.18
Sulawesi Barat	0.36	0.35	0.34	0.33	0.33	0.30	0.30	0.32	0.33
Maluku	0.26	0.25	0.24	0.43	0.44	0.43	0.42	0.43	0.36
Maluku Utara	0.27	0.25	0.24	0.43	0.44	0.45	0.95	1.38	0.55
Papua Barat	1.51	1.47	1.46	1.49	1.45	1.43	1.57	1.70	1.51
Papua	0.83	0.84	0.85	0.81	0.82	0.82	0.44	0.43	0.73
Indonesia	**0.74**	**0.74**	**0.75**	**0.75**	**0.74**	**0.70**	**0.70**	**0.70**	**0.73**

Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson antarprovinsi di Indonesia pada Tabel 1.1 di atas, data menunjukkan bahwa terdapat variasi ketimpangan yang signifikan, dengan cakupan kategori dari rendah, sedang, tinggi hingga sangat tinggi. Provinsi yang masuk dalam kategori ketimpangan sangat tinggi ditandai dengan nilai indeks yang mendekati atau bahkan melampaui angka 1,0, mencerminkan ketimpangan pembangunan yang sangat ekstrem antarwilayah dalam satu kesatuan provinsi. Berdasarkan data rata-rata ketimpangan pembangunan di Indonesia, di antaranya Papua Barat dan Sulawesi Tengah yang secara konsisten memiliki ketimpangan > 1,0. Kondisi ini mencerminkan situasi di

mana aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan layanan publik terkonsentrasi kuat di sedikit kabupaten/kota, sementara wilayah lain tertinggal jauh sehingga kesenjangan pembangunan antardaerah sangat besar. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik wilayah kepulauan dan geografis yang sulit, ketidakseimbangan jaringan transportasi dan logistik, serta dominasi sektor ekstraktif atau pusat pertumbuhan di satu dua kota yang tidak diikuti pemerataan manfaat ke daerah *hinterland*.

Sementara itu, provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, meskipun secara nasional dianggap lebih maju, dalam grafik tetap berada pada kategori ketimpangan tinggi dengan indeks sekitar 0,6 hingga 0,9, yang berarti perbedaan antara kabupaten/kota industri atau metropolitan dengan daerah agraris dan pinggiran masih cukup tajam, ditandai oleh konsentrasi investasi, lapangan kerja formal, dan fasilitas pendidikan hingga kesehatan di kawasan perkotaan tertentu. Selanjutnya, Provinsi Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, serta Nusa Tenggara Barat dan Timur juga memiliki nilai di atas 0,5 hampir di seluruh periode sehingga tetap diklasifikasikan sebagai ketimpangan tinggi. Meskipun secara spasial wilayahnya relatif lebih kompak dibanding Papua maupun Maluku, pola urbanisasi yang terkonsentrasi, perbedaan akses infrastruktur antarkota inti dan kabupaten sekitar, serta keterbatasan pemerataan investasi membuat disparitas PDRB per kapita antardaerah belum dapat turun ke kategori sedang atau rendah.

Secara nasional, tren Indeks Williamson Indonesia pada tahun 2017-2024 bergerak mendatar yakni berkisar antara 0,70-0,76 yang menunjukkan ketimpangan antarprovinsi pada level tinggi. Data tersebut menegaskan bahwa masih banyak wilayah dengan permasalahan ketimpangan pembangunan yang serius yakni tinggi hingga sangat tinggi, sehingga memerlukan kebijakan yang secara spesifik menyasar pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan nilai tambah ekonomi di daerah-daerah yang selama ini tertinggal di dalam masing-masing provinsi.

Secara umum, keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari seberapa cepat perkembangan ekonomi. Dengan demikian, setiap daerah secara konsisten menentukan sasaran pertumbuhan yang tinggi dalam rencana dan tujuan pembangunannya. PDRB yang pesat dan berkelanjutan adalah syarat utama bagi kelangsungan pembangunan. Tingginya PDRB suatu negara tidak menunjukkan bahwa semua daerah di dalamnya memiliki PDRB yang tinggi juga, hal tersebut disebabkan oleh perbedaan kemampuan daerah dalam upaya meningkatkan PDRB (Kuncoro, 2014). Negara-negara dengan pendapatan tinggi umumnya menunjukkan perbedaan pembangunan yang lebih sedikit. Artinya, seiring meningkatnya pendapatan per individu dalam suatu negara, distribusi kekayaan di antara masyarakatnya semakin seimbang (Pamiati & Woyanti, 2021).

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Indonesia Tahun 2017-2024

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas dasar Harga konstan (ADHK) seri 2010 (Miliar Rupiah)								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Aceh	121,241	126,824	132,070	131,581	135,274	140,972	146,933	153,780	136,084
Sumatera Utara	487,531	512,763	539,514	533,746	547,652	573,529	602,236	632,535	553,688
Sumatera Barat	155,984	163,996	172,206	169,427	175,000	182,628	191,069	199,420	176,216
Riau	470,984	482,065	495,607	489,996	506,472	529,533	551,828	571,234	512,215
Jambi	136,502	142,902	149,111	148,354	153,851	161,732	169,259	176,868	154,822
Sumatera Selatan	281,571	298,484	315,465	315,129	326,405	343,504	360,967	379,120	327,581
Bengkulu	42,074	44,164	46,345	46,338	47,854	49,916	52,052	54,455	47,900
Lampung	220,626	232,166	244,378	240,320	246,966	257,534	269,241	281,557	249,099
Kep. Bangka Belitung	49,985	52,208	53,942	52,706	55,370	57,804	60,336	60,802	55,394
Kep. Riau	166,082	173,499	181,878	174,959	180,952	190,111	199,913	209,939	184,667
DKI Jakarta	1,635,359	1,735,208	1,836,241	1,792,291	1,856,001	1,953,489	2,050,474	2,151,199	1,876,283
Jawa Barat	1,343,662	1,419,624	1,490,960	1,453,381	1,507,746	1,589,985	1,669,406	1,752,124	1,528,361
Jawa Tengah	893,750	941,091	991,517	965,227	997,321	1,050,278	1,102,437	1,156,999	1,012,328
DI Yogyakarta	92,300	98,024	104,485	101,699	107,373	112,901	118,626	124,590	107,500
Jawa Timur	1,482,300	1,563,442	1,649,896	1,611,393	1,668,754	1,757,875	1,844,809	1,935,810	1,689,285
Banten	410,137	433,783	456,620	441,149	460,953	484,129	507,426	531,735	465,741
Bali	144,933	154,073	162,693	147,499	143,872	150,831	159,464	168,199	153,945
Nusa Tenggara Barat	94,608	90,349	93,872	93,289	95,438	102,074	103,906	109,415	97,869
Nusa Tenggara Timur	62,725	65,929	69,389	68,810	70,541	72,711	75,247	78,162	70,439
Kalimantan Barat	124,289	130,596	137,243	134,743	141,212	148,369	154,981	162,574	141,751
Kalimantan Tengah	89,545	94,566	100,349	98,934	102,481	109,095	113,612	118,682	103,408
Kalimantan Selatan	121,859	128,053	133,284	130,864	135,425	142,339	149,226	156,770	137,227
Kalimantan Timur	452,742	464,694	486,523	472,393	484,440	506,159	537,630	570,824	496,926
Kalimantan Utara	54,537	57,459	61,418	60,746	63,168	66,528	69,831	73,134	63,353
Sulawesi Utara	79,484	84,250	89,009	88,126	91,791	96,768	102,070	107,575	92,384
Sulawesi Tengah	97,475	117,556	127,935	134,153	149,816	172,625	193,181	212,282	150,628
Sulawesi Selatan	288,814	309,156	330,506	328,155	343,395	360,913	377,208	396,142	341,786
Sulawesi Tenggara	83,002	88,310	94,054	93,446	97,275	102,656	108,153	113,989	97,611
Gorontalo	25,090	26,719	28,430	28,425	29,108	30,282	31,644	32,952	29,081
Sulawesi Barat	29,282	31,114	32,844	32,074	32,898	33,643	35,402	37,087	33,043
Maluku	27,814	29,457	31,049	30,766	31,881	33,575	35,323	37,210	32,134
Maluku Utara	23,211	25,034	26,598	28,031	32,739	40,248	48,929	55,741	35,066
Papua Barat	56,908	60,466	62,075	61,604	61,289	62,531	40,966	49,486	56,916
Papua	148,818	159,712	134,566	137,787	158,675	172,907	49,550	51,587	126,700
Indonesia	**9,912,928**	**10,425,852**	**10,949,155**	**10,722,999**	**11,120,060**	**11,710,223**	**12,301,453**	**12,920,532**	**11,257,900**

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2017-2024)

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto pada Tabel 1.2 di atas, perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang berfluktuasi selama periode 2017 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya konsentrasi aktivitas ekonomi yang masih terpusat pada wilayah-wilayah dengan infrastruktur yang matang dan akses pasar yang luas. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa bertindak sebagai pusat pertumbuhan utama yang menyerap sebagian besar perputaran modal nasional, sehingga menciptakan jarak ekonomi yang lebar dengan wilayah di luar Pulau Jawa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi kue pembangunan belum sepenuhnya menjangkau wilayah pelosok, meskipun secara nasional angka PDRB menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Lebih jauh lagi, berdasarkan data ini menunjukkan bahwa daerah yang kaya akan sumber

daya alam cenderung memiliki nilai ekonomi yang tinggi, namun sering kali pertumbuhan tersebut bersifat fluktuatif dan tidak stabil. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketergantungan wilayah tertentu pada sektor primer yang rentan terhadap perubahan harga komoditas global. Akibatnya, peningkatan PDRB di wilayah tersebut belum tentu diikuti oleh pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, yang pada akhirnya justru dapat memperdalam jurang ketimpangan pembangunan secara struktural di Indonesia.

Perbedaan skala ekonomi antarprovinsi yang terlihat dalam data tersebut juga memberikan gambaran mengenai kapasitas fiskal daerah yang berbeda-beda dalam membiayai pembangunannya. Wilayah dengan PDRB rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam menciptakan pendapatan asli daerah, sehingga sangat bergantung pada intervensi fiskal dari pemerintah pusat. Tanpa adanya integrasi kebijakan yang tepat, daerah dengan ekonomi kecil akan terus tertinggal di belakang provinsi-provinsi maju, sehingga target pengurangan disparitas pembangunan sulit untuk dicapai secara sistematis. Fluktuasi PDRB ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari kebijakan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat secara konsisten menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen vital untuk meredistribusi kekayaan dan memfasilitasi pembangunan yang ada di setiap daerah.

Berdasarkan Tabel 1.3 Realisasi Transfer ke Daerah di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2024, terlihat adanya disparitas alokasi yang lebar antarwilayah. Data tersebut menunjukkan tren positif jangka panjang dengan komitmen penguatan fiskal daerah yang konsisten. Meski sempat kontraksi pada tahun 2020 akibat realokasi anggaran pandemi COVID-19, total TKD berhasil mencapai puncaknya di tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan sekitar dari tahun 2023 ke 2024, secara keseluruhan, TKD mencatat kenaikan total kumulatif mencapai 15,1% dalam 8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa fluktuasi tahunan, lebih mencerminkan penyesuaian kebijakan komitmen pusat. Secara umum, kapasitas fiskal yang ditransfer ke daerah menunjukkan rata-rata pertumbuhan positif per tahun selama periode tersebut.

Sedangkan pada tingkat provinsi, terlihat perbedaan yang mencolok dalam besaran dan pola TKD yang diterima. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah secara konsisten menjadi penerima (TKD) terbesar karena faktor populasi serta skala administratifnya. Di Jawa Barat, penerimaan meningkat dari tahun 2017 hingga 2024 dengan kenaikan sekitar 13,6%, didorong oleh besarnya jumlah penduduk serta kontribusi sektor industri dan jasa. Meskipun pada 2026 diprediksi terdapat pengurangan dana bagi provinsi maupun kabupaten/kota, pemerintah setempat berupaya melakukan efisiensi pada belanja tidak esensial demi menjaga kelancaran pembangunan. Sementara itu, Jawa Timur mencatat kenaikan TKD sekitar 11,3% pada periode yang sama, yang didukung oleh skala ekonomi dari sektor industri pengolahan dan ekspor. Namun, rencana pemangkasan anggaran pada 2026 bagi pemerintah provinsi dan daerah dibawahnya berpotensi memengaruhi program strategis ketahanan pangan dan infrastruktur. Di sisi lain, DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam, sempat menurun pada rentang 2017 hingga 2019, kemudian melonjak signifikan hingga 60% pada 2023, lalu kembali terkoreksi sekitar 18 hingga 20% pada 2024. Pola ekstrem ini mengindikasikan sensitivitas alokasi terhadap fungsi kekhususan Jakarta, kondisi fiskal nasional, serta penataan hubungan keuangan pusat ke daerah.

Tabel 1. 2 Total Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Indonesia Tahun 2017 -2024

Provinsi	Transfer Ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi di Indonesia (Miliar Rupiah)								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Aceh	35,226	34,317	35,944	33,668	33,858	32,853	31,075	31,749	33,586
Sumatera Utara	40,321	40,234	42,056	39,644	41,152	40,391	42,733	43,702	41,279
Sumatera Barat	20,043	20,151	21,489	19,926	20,057	19,291	20,261	20,418	20,204
Riau	21,395	21,955	24,905	22,351	24,250	22,942	25,522	23,249	23,321
Jambi	13,712	13,895	15,096	13,888	14,258	14,593	15,353	14,903	14,462
Sumatera Selatan	27,714	28,925	32,014	28,942	29,692	32,512	35,433	32,800	31,004
Bengkulu	9,972	9,712	10,621	10,039	10,112	9,883	10,560	10,946	10,230
Lampung	21,835	22,040	22,255	21,218	21,372	21,134	21,528	22,089	21,684
Kep. Bangka Belitung	6,380	6,764	7,317	6,576	6,964	7,947	7,454	6,606	7,001
Kep. Riau	7,598	7,999	9,273	8,446	8,217	8,675	10,151	8,009	8,546
DKI Jakarta	18,990	17,855	15,421	17,358	23,191	20,802	25,080	20,552	19,906
Jawa Barat	64,735	65,054	69,240	67,585	70,219	67,251	71,032	73,574	68,586
Jawa Tengah	64,437	64,188	67,987	65,595	66,289	64,469	66,772	68,557	66,037
DI Yogyakarta	9,563	9,415	10,362	10,153	10,182	9,931	10,241	10,496	10,043
Jawa Timur	72,012	75,833	79,341	74,632	78,833	78,626	81,922	80,182	77,673
Banten	15,298	15,470	16,439	16,158	16,794	16,170	17,467	17,752	16,443
Bali	11,203	11,141	11,612	11,307	11,597	11,004	11,065	11,595	11,315
Nusa Tenggara Barat	15,307	15,177	16,031	14,887	15,291	16,261	17,387	17,065	15,926
Nusa Tenggara Timur	21,724	22,281	24,019	22,692	22,558	22,633	24,127	24,745	23,097
Kalimantan Barat	19,472	19,295	20,338	18,808	20,188	19,226	21,091	20,554	19,872
Kalimantan Tengah	16,380	16,743	17,572	16,647	17,487	19,202	28,862	24,097	19,624
Kalimantan Selatan	15,796	17,297	20,291	18,179	17,116	25,902	34,980	31,425	22,623
Kalimantan Timur	17,336	21,237	26,873	23,954	21,240	40,583	57,315	40,430	31,121
Kalimantan Utara	6,023	6,330	6,897	6,705	6,989	7,835	11,593	9,374	7,718
Sulawesi Utara	13,918	13,791	14,138	13,418	13,736	13,660	13,200	13,351	13,651
Sulawesi Tengah	15,411	15,563	16,835	16,224	16,815	16,933	19,947	18,696	17,053
Sulawesi Selatan	29,942	30,605	31,546	29,720	30,356	29,642	30,217	31,691	30,465
Sulawesi Tenggara	15,265	15,906	17,190	16,549	17,899	18,508	20,840	18,853	17,626
Gorontalo	6,066	6,379	6,668	6,309	6,288	6,015	6,155	6,266	6,268
Sulawesi Barat	6,565	6,565	7,159	6,687	6,538	6,453	6,878	6,670	6,689
Maluku	12,232	12,271	12,725	11,812	12,484	11,768	12,049	12,113	12,182
Maluku Utara	9,592	10,027	10,770	10,236	10,924	11,914	14,302	12,857	11,328
Papua Barat	17,844	18,101	23,835	19,585	17,855	21,994	14,396	11,315	18,116
Papua	41,995	44,973	47,003	42,617	44,807	49,225	11,518	11,639	36,722
Total	**741,300**	**757,488**	**811,259**	**762,512**	**785,611**	**816,232**	**894,060**	**853,491**	**802,744**

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) (2017-2024)

Di wilayah Kalimantan, beberapa provinsi juga menunjukkan dinamika yang menarik. Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan TKD yang signifikan hingga tahun 2024, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebelum mengalami normalisasi di tahun berikutnya. Kalimantan Timur turut mengalami pertumbuhan pesat, sebagaimana terlihat pada kenaikan tajam di tahun 2023, sementara Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan secara konsisten menunjukkan tren penguatan alokasi fiskal selama periode pengamatan. Fenomena ini menunjukkan peran strategis wilayah Kalimantan dalam pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi potensi sumber daya alam serta akselerasi pembangunan kawasan baru.

Di luar Jawa dan Kalimantan, sebagian provinsi menunjukkan tren pertumbuhan stabil meskipun nilai TKD-nya relatif lebih kecil. Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan kenaikan kumulatif melalui pertumbuhan tahunan yang bertahap setiap tahunnya hingga 2024. Sejalan dengan itu, Sumatera Utara selaku salah satu wilayah utama di Sumatera, serta Bali juga mencatat pertumbuhan yang stabil meskipun diwarnai dengan fluktuasi tahunan tertentu. Dinamika ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap percepatan bangunan di kawasan timur Indonesia serta

upaya pemerataan pembangunan antarwilayah demi mengatasi ketimpangan antara kawasan barat dan Jawa.

Di sisi lain, provinsi Papua menjadi representasi signifikan dari perubahan alokasi akibat faktor kelembagaan dan administratif. Hingga tahun 2022, alokasi untuk Papua terus mengalami peningkatan hingga mencapai titik puncak, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan drastis pada entitas Papua induk. Penurunan signifikan tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembentukan Daerah otonom Baru (DOB) di wilayah Papua, sehingga alokasi yang sebelumnya terpusat kini didistribusikan ke provinsi-provinsi hasil pemekaran. Meskipun terjadi perubahan data pada tingkat provinsi induk, total alokasi dana untuk wilayah Papua secara keseluruhan diproyeksikan tidak berubah. Di tingkat nasional, jumlah TKD secara keseluruhan menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2017 hingga 2024. Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) berperan sebagai tulang punggung fiskal daerah, yang utamanya digunakan untuk mendanai belanja publik esensial seperti sektor pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Tabel 1.4 Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk periode 2017 hingga 2024 secara jelas memvisualisasikan tren peningkatan yang stabil dan universal di wilayah Indonesia, IPM nasional terus menunjukkan tren positif dengan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Secara kumulatif, capaian tersebut mencatat pertumbuhan total sebesar 4,79% selama periode tersebut, yang mencerminkan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan berkelanjutan dalam tiga dimensi utama IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat Indonesia. Meskipun pertumbuhan tahunan terlihat moderat, stabilitas kenaikan tanpa ada tren penurunan menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan pembangunan yang telah diimplementasikan. Peningkatan IPM juga sejalan dengan upaya pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pondasi bagi perkembangan ekonomi dan sosial bangsa.

Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2024

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Indonesia (Skala Indeks)								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
Aceh	70.60	71.19	71.90	71.99	72.18	72.80	73.40	74.03	72.26
Sumatera Utara	70.57	71.18	71.74	71.77	72.00	72.71	73.37	74.02	72.17
Sumatera Barat	71.24	71.73	72.39	72.38	72.65	73.26	73.75	74.49	72.74
Riau	71.79	72.44	73.00	72.71	72.94	73.52	74.04	74.79	73.15
Jambi	69.99	70.65	71.26	71.29	71.63	72.14	72.77	73.43	71.65
Sumatera Selatan	68.86	69.39	70.02	70.01	70.24	70.90	71.62	72.30	70.42
Bengkulu	69.95	70.64	71.21	71.40	71.64	72.16	72.78	73.39	71.65
Lampung	68.25	69.02	69.57	69.69	69.90	70.45	71.15	71.81	69.98
Kep. Bangka Belitung	69.99	70.67	71.30	71.47	71.69	72.24	72.85	73.33	71.69
Kep. Riau	74.45	74.84	75.48	75.59	75.79	76.46	77.11	77.97	75.96
DKI Jakarta	80.06	80.47	80.76	80.77	81.11	81.65	82.46	83.08	81.30
Jawa Barat	70.69	71.30	72.03	72.09	72.45	73.12	73.74	74.43	72.48
Jawa Tengah	70.52	71.12	71.73	71.87	72.16	72.79	73.39	73.88	72.18
DI Yogyakarta	78.89	79.53	79.99	79.97	80.22	80.64	81.07	81.55	80.23
Jawa Timur	70.27	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75	73.38	74.09	72.08
Banten	71.42	71.95	72.44	72.45	72.72	73.32	73.87	74.48	72.83
Bali	74.30	74.77	75.38	75.50	75.69	76.44	77.10	77.76	75.87
Nusa Tenggara Barat	66.58	67.30	68.14	68.25	68.65	69.46	70.20	70.93	68.69
Nusa Tenggara Timur	63.73	64.39	65.23	65.19	65.28	65.90	66.68	67.39	65.47
Kalimantan Barat	66.26	66.98	67.65	67.66	67.90	68.63	69.41	70.13	68.08
Kalimantan Tengah	69.79	70.42	70.91	71.05	71.25	71.63	72.20	72.73	71.25
Kalimantan Selatan	69.65	70.17	70.72	70.91	71.28	71.84	72.50	73.03	71.26
Kalimantan Timur	75.12	75.83	76.61	76.24	76.88	77.44	78.20	78.83	76.89
Kalimantan Utara	69.84	70.56	71.15	70.63	71.19	71.83	72.49	73.02	71.34
Sulawesi Utara	71.66	72.20	72.99	72.93	73.30	73.81	74.36	75.03	73.29
Sulawesi Tengah	68.11	68.88	69.50	69.55	69.79	70.28	70.95	71.56	69.83
Sulawesi Selatan	70.34	70.90	71.66	71.93	72.24	72.82	73.46	74.05	72.18
Sulawesi Tenggara	69.86	70.61	71.20	71.45	71.66	72.23	72.79	73.48	71.66
Gorontalo	67.01	67.71	68.49	68.68	69.00	69.81	70.45	71.23	69.05
Sulawesi Barat	64.30	65.10	65.73	66.11	66.36	66.92	67.55	68.20	66.28
Maluku	68.19	68.87	69.45	69.49	69.71	70.22	70.94	71.57	69.81
Maluku Utara	67.20	67.76	68.70	68.49	68.76	69.47	70.21	71.03	68.95
Papua Barat	62.99	63.74	64.70	65.09	65.26	65.16	66.16	67.02	65.02
Papua	59.09	60.06	60.84	60.44	60.62	71.76	72.41	73.00	64.78
Indonesia	**70.81**	**71.39**	**71.92**	**71.94**	**72.29**	**72.91**	**73.55**	**74.20**	**72.38**

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2017-2024)

DKI Jakarta mempertahankan statusnya sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, secara konsisten melampaui batas kategori sangat tinggi dengan pertumbuhan sebesar 5,11% selama periode 2017 hingga 2024. Di belakang Jakarta, provinsi-provinsi di pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa timur dan Banten secara rutin mengisi posisi menengah hingga atas, meskipun peringkat internal mereka dapat bergeser dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran pada akhir periode pengamatan, IPM Jawa Timur mencatatkan posisi yang sedikit melampaui jawa Barat, sementara Banten bahkan mencatatkan salah satu capaian IPM tertinggi di luar Jakarta.

Perubahan tren dari tahun ke tahun juga signifikan. Pada awal periode pengamatan, empat provinsi teratas setelah Jakarta umumnya diisi oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Memasuki periode pertengahan, urutan ini menjadi lebih dinamis dan menunjukkan perlambatan serta kenaikan yang sangat kecil di hampir semua provinsi. Perlambatan ini ialah dampak langsung dari dampak COVID-19, di mana

kegiatan ekonomi terhenti yang dapat menekan pengeluaran riil per kapita dan akses layanan kesehatan non-COVID-19 juga terganggu sehingga berpotensi menahan kenaikan Angka Harapan Hidup (AHH). Sedangkan pada periode 2021 hingga 2024 kembali terjadi pemulihan pasca pandemi yakni kembali meningkatnya daya beli masyarakat/pengeluaran riil per kapita dan kembali fokusnya pemerintah pada pelayanan kesehatan dasar sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup. Banten dan Sulawesi Utara, yang memiliki IPM cukup tinggi pada tahun 2024, menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi regional dan pembangunan infrastruktur yang merata berperan penting dalam memicu IPM.

Sementara itu, wilayah Indonesia bagian timur secara konsisten berada di posisi terbawah, dengan Papua sebagai provinsi dengan IPM terendah sepanjang periode, meskipun secara akumulatif mencatatkan pertumbuhan sebesar 7,46% dari tahun 2017 hingga 2024. Meskipun ada peningkatan, IPM yang relatif rendah di wilayah ini seringkali disebabkan oleh tantangan geografis yang mempersulit distribusi layanan pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya Pendapatan Per Kapita di wilayah pedalaman. Provinsi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku juga berada di urutan bawah, dengan kenaikan IPM mereka yang didorong oleh fokus pada peningkatan mutu guru dan program kesehatan spesifik untuk ibu dan anak yang sangat vital untuk komponen IPM. Secara keseluruhan, IPM Indonesia bergerak naik dengan rata-rata IPM mencapai 74,20 di 2024, mencerminkan keberhasilan upaya kolektif dalam meningkatkan kualitas hidup, tetapi kesenjangan yang lebar, yang diukur dari selisih IPM antara DKI Jakarta dan Papua, tetap menjadi isu struktural yang perlu diatasi melalui kebijakan afirmasi fiskal dan pembangunan infrastruktur yang lebih intensif di wilayah Timur Indonesia, guna mengurangi ketimpangan pembangunan di setiap daerah di Indonesia.

Beberapa studi penelitian sebelumnya seperti penelitian Harmadi et al., (2019); Ramadanti et al., (2023); Syaifudin et al., (2024) telah meneliti faktor-faktor penggerak utama ketimpangan pembangunan seperti PDRB per kapita dan IPM, namun sebagian besar hanya menyoroti disparitas antarwilayah secara umum dan komparatif terhadap seluruh wilayah dan pulau, sehingga luput memberikan solusi spesifik pada area dengan tingkat ketimpangan paling parah. Pemilihan fokus penelitian yang hanya pada provinsi dengan kategori wilayah yang tertinggal dan tidak merata merupakan hal yang sangat penting, karena penelitian juga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran dan aplikatif bagi wilayah prioritas. Penelitian yang ada juga cenderung membahas secara terpisah pengaruh pertumbuhan ekonomi, transfer ke daerah dan IPM, serta masih sedikit yang menganalisis interaksi ketiganya secara simultan dalam model empiris yang komprehensif.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan konsekuensi dari proses pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak merata. Variasi dalam ketiga aspek tersebut dapat memberikan kontribusi pada perubahan pola ketimpangan pembangunan di Indonesia yang menunjukkan tren adanya perbedaan pembangunan antarwilayah yang tentunya perlu diikuti dan diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Di tengah dinamika pembangunan wilayah di Indonesia, fenomena menarik terlihat pada beberapa provinsi dengan kategori ketimpangan pembangunan tertinggi > 0,5 yaitu kesenjangan yang terjadi meskipun pertumbuhan ekonominya menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, secara

keseluruhan trennya menunjukkan arah peningkatan. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) di provinsi-provinsi tersebut juga mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus menunjukkan perkembangan positif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, diketahui bahwa ketimpangan merupakan permasalahan utama dalam pembangunan wilayah di Indonesia, di mana terjadi ketidakseimbangan atau ketidakmerataan yang menghasilkan daerah tertinggal dan daerah maju. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat ketimpangan di suatu wilayah, baik faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Hal ini terlihat dari dinamika yang menarik terkait fluktuasi Pertumbuhan Ekonomi, Transfer ke Daerah serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Determinan Ketimpangan Pembangunan di Indonesia" untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi, transfer ke daerah, dan indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pembangunan antar Provinsi di Indonesia.